

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Mawardi. *Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam* [Al-Ahkam al-Sulthaniyah]. Diterjemahkan oleh Fadhli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Ayza, Bustamar. *Hukum Pajak Indonesia*. Ed. 1, cet. 1. Jakarta: Kencana, 2017.
- Berata, I Komang Oko. *Panduan Praktis Ekspor Impor*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Fauziah, Ifat. *Buku Panduan Ekspor-Impor*. Jakarta: Penerbit Ilmu, 2018.
- Gunadi. *Panduan Komprehensif Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: PT. Multi Utama Consultindo, 2011.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Ed. Revisi. Cet. 3. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Karim, Adi Warman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cet. 6. Jakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2002.
- Lubis, Gustian Djuanda Irwansyah. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Meliala, Tulis S. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Ed. 4, cet. 1. Jakarta: Penerbit Semesta Media, 2007.
- Ra'ana, Irfan Mahmud. *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 1990.
- Sani, Abdul. R. Isis Ismail, dan Fx. Suwito Marsam, *Buku Pintar Kepabeanan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Sasono, Herman Budi. *Manajemen Impor dan Importasi Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013.
- Shidarta, Abdul Rasyid, dan Ahmad Sofian. *Aspek Hukum Ekonomu & Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia, 2015.
- Sukardji, Untung. *Pokok-Pokok PPN Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Ed. Revisi, cet. 11. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Sumarsan, Thomas. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Ed. 4, cet. 1. Jakarta: PT. Indeks, 2015.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Yamin, Mohammad. *Pajak Pertambahan Nilai*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

### B. Jurnal

- Dedi. "Konsep Kewajiban Membayar Pajak dan Zakat Dalam Islam", *Turast: Jurnal Penelitian & Pengabdian*. Vol. 5, No. 2. Juli-Desember 2017. Hal. 206.

- Gazali. "Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 7. No. 1. Juni 2015. Hal. 100.
- Hayati, Siti. "Dampak Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz terhadap Kesejahteraan Masyarakat Daulah Umawiyah". *Millah: Jurnal Studi Agama*. Vol. 19. No. 1. Agustus 2019. Hal. 109.
- Sugiyah dan Nurhidayati. "Prosedur Pengadaan Barang Impor Produk Sepatu Di Pt Sinar Pratama Agung Jakarta". *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Vol. 16, No. 02. Oktober 2019. Hal. 270-271.
- Winarno, Jatmiko. "Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan". *Jurnal Independent: Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan*. Vol. 1, No. 2. 2013. Hal. 2.

### C. Skripsi

- Andiani, Dhinar. "Sengketa Klasifikasi Barang Impor Jenis Alas Kaki Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071/B/PK/PJK/2017)". Diploma Thesis Universitas YARSI, Jakarta, 2018.

### D. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*. UU Nomor 17 Tahun 2006.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. UU Nomor 28 Tahun 2007.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. UU Nomor 42 Tahun 2009.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai*. PP Nomor 81 Tahun 2015.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai*. PMK Nomor 267/PMK.010/2015.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 Tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai*. PMK Nomor 142/PMK.010/2017.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenmn Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis, Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Telah Dibebaskan Dari*

*Pengenmn Pajak Pertambahan Nilai Yang Digunakan Tidak Sesuai Dengan Tujuan Semula Atau Dipindahtangankan, Dan Pengenmn Sanksi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai. PMK Nomor 115/PMK.03/2021.*

#### **E. Internet**

Pajak. “Jenis Pajak Pusat”. <https://www.pajak.go.id/id/jenis-pajak-pusat>, diakses pada tanggal 26 September 2021.

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-strategis/>, diakses pada tanggal 26 September 2021.

Republika Online. “Sistem Perpajakan di Masa Rasulullah”, <https://www.republika.co.id/berita/omwyss313/sistem-perpajakan-di-masa-rasulullah>, diakses pada tanggal 29 September 2021.

[http://repository.radenintan.ac.id/1612/4/12.\\_BAB\\_III.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/1612/4/12._BAB_III.pdf), diakses pada tanggal 29 September 2021.

Scribd. “*Tasharruful Imam ‘Ala Al Ra’iyyah Manutun Bi Al Maslahah (Telaah Konseptual)*”. <https://id.scribd.com/doc/47342542/qawaid-al-fiqhiyyah-tasharrusful-imam> diakses pada tanggal 18 Januari 2022.